

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang semula dipandang sebelah mata akhirnya terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu (2011), UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM.

UKM muncul sebagai penyelamat perekonomian Indonesia pada waktu krisis ekonomi menerjang. UKM mampu bertahan di saat perusahaan-perusahaan besar yang awalnya dianggap pemerintah dapat menopang perekonomian Indonesia ternyata tidak berdaya dan malah bangkrut. Di sisi lain sumbangan UKM dalam menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat penting. UKM berhasil menyumbang secara signifikan pertumbuhan PDB di negara ini

lebih setengah atau tepatnya 60% dari total PDB dan mempekerjakan 97% tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2011. Oleh karenanya, perhatian dan kepedulian pemerintah atas tumbuh kembang UKM dengan segala dinamikanya itu adalah langkah tepat dan relevan, terutama pada fokus pengembangan perekonomian Indonesia ditinjau dari sektor riil(www.depkop.go.id,2013).

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, unit usaha berkategori UKM dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kekayaan dan hasil penjualan. Disebut usaha kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan maksimal satu miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penjualan tahunan antara tiga ratus juta rupiah sampai dengan dua milyar lima ratus juta rupiah. Kriteria usaha menengah mempunyai kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah hingga sepuluh milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Total penjualan tahunan antara dua milyar lima ratus juta rupiah hingga mencapai lima puluh milyar rupiah.

Kendala yang sering dihadapi para pelaku bisnis UKM adalah pemasaran produk, teknologi, pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan permodalan. Seringkali para pelaku bisnis UKM mengabaikan pengelolaan keuangan. Dampak dari diabaikannya pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat secara jelas, namun tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut. Untuk meminimalisasi kejadian tersebut para pelaku UKM harus menerapkan manajemen yang baik dalam pencatatan transaksi keuangannya. Mereka perlu dibekali kemampuan

dalam membukukan transaksi keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan( Dharma, 2010).

Sistem pembukuan UKM selama ini umumnya sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku). Padahal laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu mereka dalam upaya pengembangan bisnisnya secara kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sudah menyiapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) untuk UKM yang dinamakan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang resmi diberlakukan efektif 1 Januari 2011. Prinsip-prinsip SAK penting diperhatikan pihak UKM agar pengelolaan bisnis lebih efektif, efisien, dan akurat, agar UKM dapat mengelola usahanya secara profesional dan berkembang lebih besar lagi. SAK ETAP ini adalah suatu prinsip, prosedur, metode, atau aturan penyusunan laporan keuangan pada Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu entitas usaha yang tidak (belum) tercatat di pasar modal atau tidak dalam proses pengajuan di pasar modal dan entitas ini bukan lembaga keuangan. Entitas usaha yang dimaksud disini adalah untuk unit usaha ekonomi berskala kecil dan menengah (UKM).

Apabila SAK ETAP diterapkan oleh pelaku bisnis UKM, perbankan akan mudah dalam menilai kelayakan bisnis UKM untuk memperoleh bantuan tambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Di samping itu, UKM tentu akan memiliki data (keuangan) akurat yang amat berguna bagi pelaku UKM dalam upaya lebih meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi usaha. Latar belakang diperlukan SAK ETAP ini karena PSAK (Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan) yang mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) terlalu kompleks jika diterapkan oleh perusahaan kecil menengah (UKM) di Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan SAK ETAP ini “sebagai pengganti” PSAK IFRS yang juga akan diluncurkan efektif 1 Januari 2012 bagi perusahaan-perusahaan berskala besar. Memang pada mulanya sempat tercetus ide agar SAK ETAP mengikuti “IFRS for SMEs” (Small Medium Enterprise). Namun setelah dikaji lebih mendalam IFRS for SMEs itu ternyata tidak sederhana untuk ukuran perusahaan kecil menengah di Indonesia. Oleh sebab itu, SAK ETAP dianggap cocok untuk karakter bisnis UKM di Indonesia (Media Indonesia, 30 Januari 2011).

Selain itu, SAK ETAP dibuat untuk mengatasi segala keluhan penerapan PSAK umum di dalam UKM. SAK ETAP telah mengakomodir segala kebutuhan UKM untuk pelaporan keuangan. Sehingga, sudah seharusnya UKM mematuhi dan menerapkan SAK ETAP sebagai standar pelaporan keuangan baku. Sayangnya, sampai saat ini minat pelaku UKM untuk mematuhi dan menerapkan SAK ETAP masih minim (Jurnal Bogor, 11 November 2009).

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi penerapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan badan usaha UKM dagang CV. PM Surabaya dalam rangka untuk mendukung kewajaran laporan keuangan CV. PM agar sesuai dengan standar akuntansi yang diharuskan, yaitu SAK ETAP dan nantinya dapat menjadi contoh bagi UKM lain agar tertarik dan dapat menerapkan SAK ETAP dengan benar.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya CV. PM Surabaya dalam menyusun Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi laporan keuangan CV. PM Surabaya berdasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Mengidentifikasi kendala dan upaya yang dihadapi CV. PM Surabaya dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

## 1.4. Kontribusi Penelitian

Beberapa kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Teoritis
  - a. Penelitian ini berusaha menunjukkan konsekuensi ekonomi pemberlakuan standar. Pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan ETAP untuk UKM menimbulkan berbagai persoalan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, Modal dan Sistem yang diberlakukan untuk menerapkan studi kualitas ETAP.
  - b. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi kendala-kendala penerapan Standar Akuntansi Keuangan ETAP di CV. PM yang diharapkan bisa

digeneralisasi pada konteks yang mirip. Penelitian kualitatif tidak menghasilkan kesimpulan yang bisa digeneralisasi untuk semua konteks melainkan hanya yang serupa saja. Dengan kata lain, kendala yang dihadapi CV PM bisa jadi ditemukan di perusahaan lain yang seukuran dan sejenis. Kendala-kendala tersebut perlu diidentifikasi agar bisa diminimalkan untuk menyukseskan penerapan Standar Akuntansi Keuangan ETAP

- c. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan standar akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

## 2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi meminimalkan kendala-kendala penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Pengendali (ETAP).

## 3. Kontribusi Kebijakan (Dewan Standar)

Penerapan suatu standar tidak terbebas dari persoalan praktik bisnis yang bisa jadi belum siap.